

Dampak Pergeseran Strategi Populisme Recep Tayyip Erdoğan Bagi Kemenangan Pemilu Presiden Turkiye 2023

Cagar Fadli Ibrahim¹, Cecep Hidayat¹

¹Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Indonesia

Email: cagarfadli79@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji mengenai populisme sebagai strategi politik yang menjadi ciri khas pemerintahan Recep Tayyip Erdoğan di Turkiye. Melalui strategi populisme, Erdoğan berhasil mempertahankan kekuasaannya sejak 2002 hingga saat ini. Namun, sepanjang perjalanannya, strategi populisme yang digunakannya mengalami pergeseran, terutama dalam membangun narasi tentang ‘ancaman’ yang dihadapi oleh Turkiye. Pergeseran ini terlihat dari perubahan fokus ‘musuh bersama’ yang awalnya bertumpu pada perlawanan terhadap elite sekuler menjadi retorika anti-Barat dan dewesternisasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam yang melibatkan tiga informan utama (pejabat Kedutaan Besar Indonesia di Turkiye, sejarawan ahli Timur Tengah, dan peneliti/dosen), serta analisis sekunder yang diperoleh dari jurnal akademik, laporan kebijakan, dan media berita. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola dalam narasi yang digunakan oleh Erdoğan dalam Pemilu Presiden 2023, serta untuk menelaah perubahan strategi populisme yang diimplementasikan. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pergeseran strategi populisme Erdoğan, terutama melalui narasi anti-Barat dan dewesternisasi, berperan penting dalam memperkuat posisinya dalam Pemilu Presiden 2023.

Keywords: *Erdoğan, Pemilu, Pergeseran, Populisme, Strategi, Turkiye*

ABSTRACT

This study examines populism as a political strategy that has become a hallmark of Recep Tayyip Erdoğan's administration in Turkey. Through populist strategies, Erdoğan has successfully maintained his power since 2002 to the present. However, throughout his tenure, the populist strategies he has employed have undergone a shift, particularly in constructing narratives about the “threats” facing Turkey. This shift is evident in the change of focus of the “common enemy,” which initially centered on resistance against the secular elite and has now shifted to anti-Western rhetoric and de-Westernization. The method used in this study is a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews involving three key informants (an official from the Indonesian Embassy in Turkey, a Middle East historian, and a researcher/lecturer), as well as secondary analysis obtained from academic journals, policy reports, and news media. The collected data was then analyzed using thematic analysis techniques to identify patterns in the narratives used by Erdoğan in the 2023 Presidential Election, as well as to examine the changes in the populist strategy implemented. The findings of this study indicate that Erdoğan's shift in populist strategy, particularly through anti-Western and dewesternization narratives, played a significant role in strengthening his position in the 2023 Presidential Election.

Keywords: *Erdoğan, Election, Shift, Populism, Strategy, Turkey*



Gambar 1 : Peta Persebaran Pemilih Pemilu Presiden Turkiye 2023
Sumber: Kirby & Goksedef (2023)

PENDAHULUAN

Kemenangan Pemilu Presiden Turkiye 2023 yang berjalan melalui skema dua putaran menjadi momen penting dominasi politik Recep Tayyip Erdoğan dan partainya, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) selama tiga tahun berturut-turut di Turkiye. Meskipun menghadapi polarisasi politik tajam sebagaimana yang terlihat pada Gambar 1, terutama antara wilayah konservatif di timur dan basis sekuler dan etnis Kurdi di barat dan tenggara, Erdoğan berhasil mempertahankan kekuasaannya melalui strategi populis yang mengedepankan narasi anti-Barat dan nasionalisme. (Kirby & Goksedef, 2023).

Pelaksanaan Pemilu putaran pertama yang berlangsung pada 14 Mei 2023 tidak menghasilkan kandidat yang meraih lebih dari 50% suara. Erdoğan hanya memperoleh sekitar 49,5% suara dan Kemal meraih 44,9% suara (Aksit, 2023). Dalam putaran kedua yang diadakan pada 28 Mei 2023, Erdoğan pun pada akhirnya berhasil memenangkan pemilu dengan perolehan 52,14% suara berbanding 47,7%, meskipun pemilu ini berlangsung dalam suasana ketidakpuasan terhadap kebijakan yang diterapkan pemerintahannya (Tuysuz dkk., 2023).

Hal ini terlihat dari berbagai permasalahan krusial yang pernah terjadi selama pemerintahan Erdoğan seperti Kudeta Militer 2016, krisis mata uang Lira di tahun 2018 dan 2021 hingga bencana gempa bumi pada tahun 2023 (Korkut dkk., 2023). Momen penting dalam pemerintahan Erdoğan seperti gagalnya upaya kudeta

militer pada Juli 2016 sendiri digunakan Erdoğan sebagai alat untuk memperkuat kekuasaan dengan menyingkirkan lawan-lawan politiknya (Yilmaz & Morieson, 2023). Kudeta ini juga menjadi titik perubahan untuk merestrukturisasi sistem pemerintahan Turkiye melalui referendum konstitusional yang dilaksanakan pada April 2017. Dengan begitu, Turkiye secara resmi beralih dari sistem parlementer ke presidensial yang secara langsung memberikan hak kepada Erdoğan untuk memperbesar kekuasaan eksekutif dengan meminimalisasi kontrol dari parlemen (Yilmaz & Morieson, 2023). Pada akhirnya Erdoğan pun semakin leluasa untuk memengaruhi narasi politik, mempersempit ruang oposisi, serta mempertahankan dukungan publik melalui propaganda populis.

Selama pemerintahan Erdoğan, krisis ekonomi juga menjadi salah satu tantangan terbesar yang berlangsung sejak pasca-referendum 2017, terutama ketika hubungan diplomatik Turkiye dan Amerika Serikat semakin memburuk yang kemudian turut menyebabkan peningkatan pengangguran, inflasi tinggi dan depresiasi tajam nilai mata uang lira hingga mencapai 40 persen. Selain itu, kebijakan ekonomi yang dijalankan Erdoğan seperti intervensi langsung dengan menolak untuk menaikkan suku bunga sebagai respons terhadap inflasi, juga disinyalir menjadi faktor memburuknya kondisi ekonomi di Turkiye (Aydın-Duzgit dkk., 2023).

Namun, meskipun pada saat itu Turkiye sedang mengalami krisis ekonomi, Erdoğan tetap mampu mempertahankan dukungan elektoralnya melalui strategi populis yang efektif. Erdoğan berupaya menarik simpati rakyat dengan menargetkan bantuan kesejahteraan sosial dan belanja sosial terutama kepada masyarakat kelas menengah ke bawah, serta menggencarkan kampanye ekonomi nasionalisme seperti pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir, produksi kendaraan listrik domestik pertama di Turkiye dan kerja sama produksi drone militer dengan negara-negara Arab (Yilmaz & Morieson, 2023). Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Akbiyik & O'Donohue (2023) dalam penelitiannya, retorika ekonomi Erdoğan yang menekankan pada sentimen nasionalisme dan janji bantuan sosial telah secara efektif mampu meningkatkan dukungan terhadapnya sebesar lima persen dibandingkan dengan kandidat lainnya.

Dalam permasalahan seperti peristiwa Kudeta 2016 serta Referendum Konstitusional 2017 yang terjadi di Turkiye merupakan cerminan adanya pergeseran penggunaan populisme dalam strategi politik Erdoğan, khususnya sebagai alat untuk menarik suara rakyat terkait kepentingan pemilu yang akan datang. Hal ini terlihat dari bagaimana visi awal Erdoğan dalam Pemilu Presiden Turkiye di tahun 2002 yang berusaha menggulingkan rezim elite sekuler dengan membawa narasi inklusivitas nilai-nilai Islam dan demokrasi. Namun, pasca-Kudeta 2016, pemerintahan Erdoğan mulai mengadopsi model populisme yang lebih eksklusif, dengan memperlihatkan karakteristik yang sejalan dengan populisme otoriter, di mana pemimpin populis kerap menihilkan peran oposisi yang secara bersamaan juga mengikis sistem demokrasi dengan supremasi eksekutif sebagai dalih untuk mempertahankan stabilitas nasional (Onis, 2023).

Menguatnya legitimasi Erdoğan sebagai aktor utama dalam pemerintahan Turkiye pada akhirnya juga berdampak pada penerapan kebijakan luar negeri Turkiye. Ideologi Islam konservatif yang dianut oleh Partai pemerintahan AKP, terutama setelah peristiwa Arab Spring, telah memberikan peluang bagi Turkiye untuk memperluas pengaruhnya di Timur Tengah. Bahkan, sejak tahun 2010 hingga seterusnya, kebijakan luar negeri Turkiye pun semakin dipolitisasi dengan membangun narasi ancaman eksternal (Aydın-Düzgit dkk., 2023)

Politisasi kebijakan luar negeri bukanlah fenomena yang unik di Turkiye, melainkan merupakan taktik yang umum digunakan oleh pemimpin populis di berbagai negara. Sebagaimana dikemukakan oleh Loffmann (2022), populis di berbagai spektrum politik kerap memanfaatkan ketidakamanan sebagai alat ideologis untuk membentuk narasi 'rakyat sejati versus elite'. Dalam kasus pemerintahan Erdoğan, narasi ini tidak hanya diarahkan kepada elite domestik tetapi juga diperluas ke tingkat internasional, di mana konflik dengan aktor asing direpresentasikan sebagai ancaman terhadap rakyat Turkiye.

Dalam praktiknya, strategi ini memungkinkan Erdoğan dan AKP untuk membangun identitas nasional yang lebih eksklusif dan memobilisasi dukungan domestik melalui narasi nilai-nilai Islam melawan Barat (Yilmaz & Morieson, 2023). Dalam konteks ini, konflik luar negeri seringkali diperlihatkan sebagai

bagian dari upaya Barat untuk melemahkan Turkiye, sehingga hal itu secara tidak langsung juga semakin menguatkan citra Erdoğan sebagai pemimpin yang dianggap mampu melindungi kepentingan bangsa dari dominasi asing. Strategi ini tentu tidak lepas dari gaya kepemimpinan Erdoğan yang berusaha memahami dan merespons kebutuhan, kekhawatiran, dan harapan rakyatnya secara personal, sebagai langkah dasar untuk membangun hubungan emosional serta loyalitas yang sakral dan 'intim' dengan pemilihnya (Turk, 2018).

Gaya kepemimpinan Erdoğan seperti itu juga telah dilakukan sejak Pemilihan Umum tahun 2002. Erdoğan bersama partai AKP berhasil menduduki tampuk kekuasaan setelah memenangkan pemilihan umum dengan memperoleh 34,2% suara di parlemen (Sen, 2010). Hal ini juga menandakan adanya pergeseran kekuasaan pemerintahan dari rezim sekuler ke rezim yang berbasis religius-konservatif. Selain itu, Kemenangan Erdoğan pada saat itu juga disebabkan oleh kondisi sosial, politik, dan ekonomi Turkiye yang memburuk di bawah pemerintahan sekuler. Sehingga hadirnya Erdoğan dianggap sebagai jawaban atas kekecewaan masyarakat terhadap rezim sekuler yang gagal (Cagaptay, 2002).

Dengan momentum-momentum tersebut, Erdoğan yang berasal dari latar belakang Islam kuat sering menggunakan narasi dengan memosisikan "rakyat sejati" sebagai korban dari elite sekuler yang gagal memenuhi kebutuhan masyarakat (Turk, 2018). Retorika dan penokohan sosok Erdoğan yang inklusif terhadap moralitas publik juga menciptakan citra bahwa Erdoğan bersama AKP adalah agen perubahan yang membawa nilai-nilai religius ke dalam ranah politik modern (Qaseem dkk., 2016). Hal ini juga sejalan dengan studi mengenai hubungan agama dan populisme di mana pada dasarnya agama memainkan peran penting dalam menciptakan gaya politik tokoh populis seperti Erdoğan. Hal ini terlihat dari bagaimana Erdoğan berusaha melegitimasi otoritas politiknya dengan menciptakan hubungan yang autentik dengan rakyatnya melalui kerangka penguatan agama (DeHanas & Shterin, 2018).

Meskipun begitu, terdapat pergeseran yang cukup signifikan mengenai narasi populis Erdoğan di Pemilihan Umum 2002 dengan Pemilihan Umum 2023. Retorika dan manuver politik yang sebelumnya bersandar pada elite sekuler kini

semakin difokuskan pada perlawanan terhadap elite global, khususnya yang berafiliasi dengan kekuatan Barat. Pergeseran ini pun sejalan dengan tren dewesternisasi, di mana Erdoğan menggambarkan Turkiye sebagai aktor global yang independen dan menolak hegemoni Barat, sambil secara aktif membangun aliansi di luar kerangka tradisional Euro-Atlantik (NATO dan Uni Eropa) (Ormeci, 2023).

Perubahan ini terlihat dalam wacana Erdoğan, di mana ia semakin sering menggunakan narasi anti-Barat, menggambarkan Uni Eropa dan Amerika Serikat sebagai kekuatan yang berupaya melemahkan kedaulatan dan stabilitas internal Turkiye dan Islam (Canveren & Kaiser, 2024). Dalam pidato-pidatonya, ia menekankan bahwa Barat telah menerapkan standar ganda terhadap Turkiye, terutama terkait isu keanggotaan Uni Eropa, kritik terhadap hak asasi manusia dalam konflik Israel-Palestina dan Rusia-Ukraina, serta intervensi militer Turkiye di Timur Tengah. Dalam contoh konteks geopolitik, Erdoğan memanfaatkan peran Turkiye sebagai mediator dalam konflik Rusia-Ukraina untuk membangun citra sebagai pemimpin global yang independen. Salah satu contoh di bidang ekonomi terlihat dari keberhasilan Turkiye dalam mengatur kesepakatan ekspor gandum melalui Laut Hitam, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Turkiye memiliki posisi strategis yang tidak bergantung pada Barat (Tas, 2022). Dalam proses ini, peran Turkiye sebagai mediator tidak hanya berfungsi sebagai alat diplomasi, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk menegaskan posisi Turkiye sebagai kekuatan menengah yang tidak tunduk pada dominasi geopolitik Barat. Dengan mengadopsi pendekatan ‘kooperatif kompetitif’, Turkiye juga menjaga keseimbangan hubungan dengan Rusia sambil tetap mempertahankan kepentingannya di NATO. (Wódka 2023). Dalam kerangka ini, pergeseran strategis Turkiye ke arah aliansi non-Barat, termasuk hubungan yang lebih erat dengan Rusia, China, dan negara-negara Muslim Timur Tengah, pada akhirnya dianggap sebagai sebuah keharusan daripada sekadar pilihan (Ormeci, 2023).

Pergeseran populisme Erdoğan dari anti-sekularisme ke anti-Barat menyoroti sifat dinamis dari politik populis, di mana musuh eksternal menggantikan lawan domestik sebagai alat retorik utamanya. Adaptasi ini

mencerminkan fleksibilitas wacana populis, yang terus-menerus merekonstruksi konsep "rakyat sejati" dan "elite" berdasarkan konteks politik dan geopolitik yang dinamis. Dengan demikian, model populisme Erdoğan kini tidak hanya berfungsi sebagai alat politik domestik, tetapi juga sebagai mekanisme untuk membentuk kembali identitas global Turkiye dalam perlawanan terhadap pengaruh Barat (Ormeçi, 2023). Oleh karena itu, kebaharuan dalam penelitian ini menitikberatkan pada kajian mengenai fenomena pergeseran dan penerapan strategi populisme Erdoğan dan dampaknya pada kemenangan Erdoğan dalam Pemilihan Umum Presiden 2023, terutama dengan sudut pandang pendekatan narasi anti-Barat dan dewesternisasi. Oleh karena itu, peneliti menawarkan sebuah pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana pergeseran strategi populisme yang dilakukan Erdoğan dapat berdampak pada kemenangan Pemilihan Umum Presiden tahun 2023? Penelitian ini sendiri memiliki implikasi penting dalam studi ilmu politik, khususnya untuk memahami bagaimana narasi populisme dapat beradaptasi secara kontekstual seiring dengan perubahan dinamika internasional dan domestik yang dihadapi suatu negara, sebagaimana yang terlihat dalam penggunaan populisme Erdoğan dalam beberapa dekade kepemimpinannya.

TINJAUAN PUSTAKA

Relasi Populisme dan Krisis

Poli (2016) dalam artikelnya "*Contemporary Populism and the Economic Crisis in Western Europe*" meneliti mengenai hubungan erat antara populisme dan krisis ekonomi, terutama dalam konteks Eropa Barat pasca-Great Recession. Pada dasarnya hubungan populisme dengan krisis ekonomi ialah sebagai alat untuk memobilisasi ketidakpercayaan rakyat terhadap elite politik dan institusi lokal maupun supranasional seperti Uni Eropa. Studi ini menyoroti bagaimana berbagai partai populis, baik dari sayap kanan maupun kiri, telah memanfaatkan kondisi krisis ekonomi untuk membangun dukungan publik dengan menampilkan Uni Eropa sebagai musuh bersama. Poli melihat terdapat berbagai kasus keberhasilan populisme di negara-negara seperti Perancis dengan Front Nasional, Inggris dengan UKIP, dan Italia dengan Gerakan Lima Bintang (M5S). Salah satu argumen kunci

dalam studi ini penggunaan narasi krisis oleh para aktor politik guna memperkuat legitimasi mereka di hadapan rakyat. Hal ini terlihat dalam retorika yang menekankan antagonisme antara “rakyat sejati” dan “elite korup”, serta dalam seruan populis untuk mengembalikan kedaulatan nasional dari pengaruh eksternal.

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa contoh kasus penerapan populisme di Eropa Barat telah secara efektif menjadi sarana aktor atau partai-partai populis untuk memanfaatkan krisis sebagai perpanjangan tangan strategi politik mereka. Argumen penelitian ini pada dasarnya berkesinambungan dengan studi kasus yang peneliti angkat mengenai strategi populisme Erdoğan dan dampaknya pada kemenangan Pemilihan Umum 2023, di mana dalam beberapa narasi populisnya, Erdoğan kerap kali menggunakan retorika-retorika yang berkaitan dengan krisis sebagai permasalahan yang berasal dari “elite global”.

Perbandingan Penggunaan Populisme dalam Pemilu Presiden Turkiye 2023

Sebnem Yardimci-Geyikci dan Hakan Yavuzylmaz (2024) dalam artikel mereka “*The 2023 Turkish Election: A Tale of Two Campaigns and the Duel of Populisms*” menyoroti dinamika politik dalam Pemilu Presiden Turkiye 2023 yang menjadi titik balik penting dalam politik negara tersebut. Artikel ini membandingkan strategi kampanye dua kandidat utama, Recep Tayyip Erdoğan dan Kemal Kılıçdaroğlu, dalam konteks populisme eksklusif dan inklusif. Erdoğan dan *People Alliance* menerapkan strategi populisme eksklusif dengan kampanye negatif yang menekankan isu-isu seperti kontra-terorisme, politik identitas, dan kedaulatan nasional untuk mempertahankan sistem pemerintahan yang ada. Sebaliknya, Kemal dan *Nation Alliance* mengusung populisme inklusif melalui kampanye positif yang berfokus pada demokratisasi, pemerintahan yang baik, dan perubahan rezim. Melalui analisisnya, penulis menyoroti bahwa di dalam rezim otoritarian kompetitif seperti Turkiye, kampanye negatif lebih banyak dimanfaatkan oleh petahana untuk memecah belah oposisi dan mengkonsolidasikan basis pemilihnya. Erdoğan memanfaatkan polarisasi ini dengan menggunakan retorika nasionalis dan religius yang mampu menyudutkan oposisi dengan tuduhan-tuduhan ekstrim. Sebaliknya, oposisi mencoba membangun narasi inklusif dengan

menjanjikan transisi menuju pemerintahan demokratis yang lebih partisipatif. Berangkat dari literatur di atas, Penelitian Yardimci-Geyikci dan Yavuzyilmaz cenderung berfokus pada perbandingan strategi populis dan kampanye politik antara Erdoğan dan Kılıçdaroğlu, tetapi belum mengkaji secara komprehensif dan detail mengenai strategi Erdoğan sendiri terutama melalui sudut pandang pendekatan anti-Barat dan dewesternisasi, sebagaimana yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Peneliti beranggapan bahwa penggunaan pendekatan anti-Barat dan dewesternisasi ini bisa memberikan perspektif yang lebih mendalam mengenai upaya Erdoğan dalam memanfaatkan strategi populisme secara lebih dinamis untuk menantang hegemoni Barat dan memperkuat posisi politiknya dalam konteks domestik maupun internasional.

Perbandingan Penggunaan Populisme di Turkiye dan Negara Lain

“The Rise of Authoritarian Civilizational Populism in Turkey, India, Russia and China” yang ditulis oleh Yilmaz dan Morieson (2024), membahas bagaimana populisme otoriter digunakan oleh Erdoğan di Turkiye, Modi di India, Putin di Rusia, dan Xi Jinping di China untuk mengonsolidasikan kekuasaan. Dalam konteks Turkiye, Erdoğan menggeser populismenya dari perlawanan terhadap elite sekuler menjadi populisme eksklusif berbasis nasionalis Islam dan anti-Barat, dengan menggambarkan Turkiye sebagai penerus Kekhalifahan Ottoman dan pemimpin dunia Muslim. Retorika ini semakin otoriter pasca-Kudeta 2016, dengan menargetkan oposisi dan kelompok minoritas yang dianggap berafiliasi dengan Barat. Model populisme yang serupa juga ditemukan pada Modi yang mengandalkan Hindutva untuk memperkuat dominasi Hindu di India, Putin yang memanfaatkan Gereja Ortodoks dan nostalgia Uni Soviet, serta Xi Jinping yang memadukan nasionalisme dengan ideologi Partai Komunis. Perbandingan ini menjadi penting karena meskipun masing-masing memiliki karakteristik berbeda, para pemimpin ini memiliki kecenderungan dalam menggunakan populisme untuk membangun identitas nasional yang kuat dan melegitimasi tindakan represif mereka terhadap oposisi. Secara global, fenomena ini menunjukkan bagaimana populisme otoriter tidak hanya memperkuat kontrol negara, tetapi juga berisiko mengikis

kebebasan sipil dan mengurangi ruang demokrasi, meskipun awalnya muncul dalam sistem yang demokratis seperti pemilu.

Tabel 1. Tabel Perbandingan Narasi Penggunaan Populisme Erdoğan, Modi, Putin, dan Xi Jinping Periode Tahun 2010-2024

Pemimpin	Negara	Narasi populisme	Musuh yang Dikonstruksi	Tujuan Politik	
Recep Tayyip Erdoğan	Turkiye	Islamis dan Nasionalis	Barat, sekuler, Kurdi, asing	oposisi minoritas organisasi	Konsolidasi kekuasaan melalui retorika anti-Barat dan dewesternisasi
Narendra Modi	India	Hindutva dan Nasionalis	Muslim oposisi kelompok liberal	India, sekuler,	Memperkuat dominasi Hindu dan menghapus pengaruh sekuler
Vladimir Putin	Russia	Ortodoks dan Nostalgia Soviet	Barat, liberal, demokrasi	oposisi aktivis pro-	Menegaskan Rusia sebagai kekuatan anti-liberal dan anti-NATO
Xi Jinping	China	Nasionalisme dan Komunis	Barat dan politik	Oposisi	Memperkuat kontrol Partai Komunis dan ekspansi geopolitik China

Sumber: Tabel diolah oleh Peneliti, 2025

KERANGKA TEORI DAN KONSEP

Teori Populisme

Benjamin Moffitt (2016) dalam buku *“The Global Rise of Populism: Performance, Political Style, and Representation”* menjelaskan bahwa populisme kontemporer berfokus pada narasi *“us vs them”*, di mana ‘rakyat sejati’ diposisikan sebagai kelompok murni dan baik, sementara elite dianggap korup dan tidak peka terhadap kebutuhan rakyat. Moffitt menekankan peran penting krisis dalam populisme, baik sebagai konteks eksternal maupun narasi internal yang dibentuk oleh populis untuk memperkuat legitimasi mereka. Para pemimpin populis

seringkali membesar-besarkan atau menciptakan krisis untuk menunjukkan bahwa mereka lebih mampu menghadapinya dibandingkan pihak lain, sehingga mereka kerap memposisikan diri sebagai satu-satunya solusi yang dapat menyelamatkan rakyat. Narasi krisis ini juga digunakan untuk menciptakan sentimen-sentimen yang memperkuat klaim populis terhadap kekuasaan dan membangun elemen performatif individu lewat pembangunan citra dan karisma tokoh sebagai perwakilan autentik dari rakyat dalam melawan elite (Moffitt, 2016).

Dalam konteks Erdoğan, sebagaimana pemimpin populis lainnya, Löffmann (2022) mengidentifikasi bahwa elite—baik dari dalam negeri maupun luar negeri—sebagai penyebab kemerosotan nasional. Dinamika ini berperan dalam strategi populis dengan menggambarkan keadaan darurat atau krisis yang hanya dapat diselesaikan oleh pemimpin populis, yang pada gilirannya memperkuat legitimasi mereka. Pada akhirnya, Löffmann (2022) berpendapat bahwa krisis bukan hanya berkaitan dengan isu-isu ekonomi atau politik yang konkret, tetapi juga yang bersifat simbolis, terkait dengan identitas nasional, kedaulatan, dan harga diri bangsa.

Pandangan Löffmann ini sejalan dengan konsep Moffitt mengenai populisme, yang menekankan bahwa krisis digunakan untuk melegitimasi klaim kekuasaan pemimpin populis. Penggunaan krisis oleh Erdoğan, seperti yang terjadi pada kegagalan Kudeta 2016 atau tantangan ekonomi lainnya, memberinya alat retorik untuk menggambarkan dirinya sebagai pelindung bangsa, sebagaimana argumen Moffitt yang menyatakan bahwa pemimpin populis seringkali membesar-besarkan atau menciptakan krisis untuk memposisikan diri mereka sebagai penyelamat rakyat. Akibatnya, terciptalah iklim politik di mana narasi populisme berkembang pesat, memecah masyarakat dan memposisikan pemimpin populis sebagai tokoh sentral yang dapat membela kepentingan rakyat terhadap elite domestik dan internasional.

Konsep Otoritarian Kompetitif

Otoritarian kompetitif menurut Levitsky dan Way (2010) merupakan penggambaran adanya elemen-elemen demokrasi formal seperti pemilihan umum,

tetapi kekuasaan tetap terkonsentrasi pada pihak penguasa melalui manipulasi media, pembatasan kebebasan oposisi, dan pengaturan hasil pemilu yang tidak adil. Kebangkitan otoritarian kompetitif, terutama setelah Perang Dingin, dapat dijelaskan oleh beberapa faktor, termasuk penurunan dukungan dari kekuatan besar terhadap rezim otoriter dan penyebaran norma-norma demokratis. Ketika bentuk-bentuk otoritarianisme tradisional mengalami penurunan, rezim baru muncul dengan mempertahankan kompetisi elektoral, tetapi membatasi kebebasan dan sumber daya yang diperlukan untuk prinsip demokrasi itu sendiri. Bentuk hibrida ini memungkinkan pemimpin otoriter mempertahankan kekuasaan sambil menjaga citra demokrasi. Rezim- rezim ini ditandai dengan ketidakseimbangan yang signifikan dalam akses terhadap sumber daya dan media, dengan kelompok oposisi seringkali tidak mampu menantang dominasi kelompok penguasa secara efektif (Levitsky & Way, 2010). Presiden Recep Tayyip Erdoğan di Turkiye merupakan contoh konkret dari model ini, karena meskipun pemilu tetap dilaksanakan, struktur kekuasaan yang tidak seimbang seringkali meminggirkan oposisi. Erdoğan menggunakan retorika populis untuk memperkuat citra dirinya sebagai pelindung bangsa, sementara pada saat yang sama ia juga mengonsolidasikan kontrol atas negara dengan membatasi kebebasan politik dan media. Dengan cara ini, Erdoğan menggabungkan populisme dan otoritarianisme kompetitif untuk membentuk iklim politik yang menguntungkan bagi dirinya, memecah masyarakat, dan memperkuat kontrol politiknya, meskipun ada kompetisi elektoral yang tampaknya demokratis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berfokus pada pemaparan data deskriptif dan interpretatif (Creswell, 2018), yakni dengan mengidentifikasi pola dari data-data spesifik untuk menghasilkan kesimpulan umum (Tim Puskapol UI, 2014). Data dikumpulkan melalui teknik *in depth-interview* secara luar jaringan (luring) dan dalam jaringan (daring) dengan tiga informan utama—pejabat Kedutaan Besar Indonesia di Turkiye, sejarawan Timur Tengah, dan peneliti/dosen—serta analisis sekunder dari jurnal akademik, laporan kebijakan, dan media berita. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk

memungkinkan eksplorasi lebih dalam terhadap jawaban informan. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara, literatur akademik, dan laporan media serta pemerintah guna meningkatkan validitas temuan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik seperti data teks (wawancara atau dokumen pemerintah) guna mengidentifikasi tema-tema yang muncul. Proses ini dilakukan secara induktif untuk menemukan pola yang mendalam dan relevan. Fokus analisis tematik juga ditujukan untuk menghubungkan tema dengan teori atau konsep yang relevan, agar memberikan pemahaman yang lebih luas tentang fenomena yang diteliti (Braun & Clarke, 2006). Data yang dihimpun kemudian digunakan untuk menjelaskan secara interpretatif pergeseran strategi populisme Erdoğan dan dampaknya terhadap kemenangan Erdoğan dalam Pemilu Presiden Turkiye 2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Krisis Ekonomi sebagai Strategi Populis Erdoğan

Krisis ekonomi Turkiye sejak 2018 menjadi instrumen strategis Presiden Erdoğan untuk mempertahankan kekuasaan. Meskipun menghadapi inflasi tinggi hingga 80% (2022), depresiasi Lira, dan meningkatnya kemiskinan, Erdoğan berhasil memenangkan Pemilu Presiden 2023 (Aydın-Duzgit dkk., 2023).

Audrey (2023) menjelaskan bahwa krisis ini bukan sekadar kegagalan ekonomi, melainkan bagian dari krisis multidimensi yang dimanfaatkan Erdoğan untuk mengkonsolidasikan kekuasaan. Erdoğan mengkonstruksi narasi nasionalisme ekonomi yang menempatkan pemerintah sebagai pelindung kedaulatan nasional dari tekanan eksternal. Strategi ini dikombinasikan dengan program sosial populis seperti subsidi energi dan bantuan tunai yang menargetkan kelompok rentan, berfungsi sebagai mekanisme patronase politik (Akbiyik & O'Donohue, 2023).

Kutlay dan Öniş (2024) menganalisis strategi Erdoğan melalui kerangka *exit, voice, and loyalty*. Erdoğan meningkatkan biaya bagi warga yang mendukung oposisi dengan menekan kebebasan politik dan mengontrol media, sambil

memperbesar manfaat loyalitas melalui program sosial dan pembangunan infrastruktur. Endro Sampurna, pejabat Kedutaan Besar Indonesia di Turkiye, menegaskan bahwa kekuatan politik Erdoğan terletak pada kemampuannya menjangkau masyarakat kelas bawah dan menengah melalui program bantuan yang dirasakan langsung (E. Sampurna, Komunikasi Pribadi, Mei 20, 2025).

Studi kuantitatif Akbiyik dan O'Donohue (2023) membuktikan bahwa pesan ekonomi Erdoğan lebih efektif dibanding isu identitas budaya dalam memenangkan dukungan pemilih. Eksperimen survei menunjukkan bahwa paparan terhadap janji investasi dalam negeri, pembangunan infrastruktur, dan pengeluaran kesejahteraan sosial berhasil meningkatkan dukungan elektoral.

Hamdan Basyar dan Prof. Yon Machmudi menyoroti kombinasi kebijakan sosial populis dengan narasi ekonomi nasionalis sebagai alat mempertahankan dukungan politik. Pengelolaan narasi melalui kontrol media dan framing isu ekonomi sebagai serangan Barat berperan penting dalam memobilisasi loyalitas akar rumput (H. Basyar & Y. Machmudi, Komunikasi Pribadi, Mei 2025).

Narasi Anti-Barat dan Dewesternisasi

Dalam dua dekade terakhir, Erdoğan menunjukkan fleksibilitas politik dalam membingkai musuh politik, dengan pergeseran narasi populis dari perlawanan terhadap elite sekuler domestik menuju perlawanan terhadap Barat global. Penggunaan narasi anti-Barat dan dewesternisasi merupakan strategi sadar untuk menciptakan musuh bersama, membangun sentimen nasionalis, dan mengalihkan perhatian dari kegagalan kebijakan domestik (Kaliber & Kaliber, 2019).

Fide (2020) mengungkapkan bahwa populisme Erdoğan mengalami pergeseran pasca-Protes Gezi dan kudeta gagal 2016, dari populisme Islamis moderat ke populisme otoriter berbasis retorika anti-Barat. Antagonisme antara "rakyat" dan "elite" diperluas menjadi perlawanan antara "rakyat Turkiye otentik" dengan "kekuatan Barat superior."

Taş (2022) mencatat bahwa kebijakan luar negeri Turkiye sejak 2010 dipengaruhi pendekatan populisme dengan karakteristik personalisasi pengambilan keputusan, nasionalisasi pelaksanaan, dan *civilizationalization* diskursus politik

luar negeri yang meromantisasi peradaban Islam dan Ottoman. Dewesternisasi menjadi reposisi Turkiye sebagai peradaban tersendiri yang tidak tunduk pada tatanan liberal Barat.

Hoffman dkk. (2018) mengidentifikasi fenomena "nasionalisme baru" Turkiye yang memobilisasi sentimen religius dan nasionalisme. Prof. Yon menyampaikan bahwa narasi krisis Erdoğan yang menyalahkan Barat berhasil menyatukan kelompok religius-konservatif dan nasionalis-sekuler (Y. Machmudi, Komunikasi Pribadi, Mei 14, 2025).

Dalam kerangka Levitsky dan Way (2010), Turkiye dapat dikategorikan sebagai rezim otoriter kompetitif di mana pemilu berlangsung tetapi tidak setara. Castaldo (2018) berargumen bahwa populisme Erdoğan berfungsi sebagai kendaraan transisional menuju otoriterisme kompetitif melalui kontrol media, delegitimasi oposisi, dan monopolisasi diskursus nasional.

Hamdan menambahkan bahwa strategi ini mengalami intensifikasi pasca-2018 ketika krisis ekonomi akibat depresiasi Lira dinarasikan bukan sebagai kegagalan kebijakan pemerintah, melainkan sabotase ekonomi aktor asing (H. Basyar, Komunikasi Pribadi, Mei 14, 2025). Namun, Endro menegaskan bahwa secara empiris masyarakat Turkiye tidak benar-benar anti-Barat dalam praktik sehari-hari, menunjukkan dualisme antara "politik simbolik" dan "kalkulasi pragmatis" (E. Sampurna, Komunikasi Pribadi, Mei 14, 2025).

Dampak pada Kemenangan Pemilu Presiden 2023

Pemilu Presiden Turkiye 2023 menegaskan dinamika politik otoriter dan populis Erdoğan. Meskipun dihadapkan bencana gempa bumi besar Februari 2023, respons pemerintah justru tidak memberikan efek elektoral negatif signifikan (Spáč dkk., 2024). Analisis kuantitatif menunjukkan dukungan terhadap Erdoğan meningkat di wilayah terdampak gempa, didukung strategi komunikasi yang memposisikan Erdoğan sebagai "pemimpin kuat" pemberi harapan dan stabilitas.

Kemal Kılıçdaroğlu sebagai kandidat oposisi mengusung agenda liberal-demokratis dengan janji mengembalikan sistem parlementer dan memperbaiki hubungan dengan Barat. Namun, upaya ini gagal menghadapi dominasi AKP dalam

konteks polarisasi politik tajam antara "rakyat sejati" dan "elite" (Bilgin & Öztürk, 2023). Perpecahan internal oposisi dan pemilihan kandidat kurang populer turut melemahkan koalisi (Meydan, 2023).

Retorika populisme otoriter AKP efektif memperkuat citra Erdoğan sebagai wakil "rakyat sejati" melawan "elite korup dan asing" (Yilmaz, 2021). Narasi ini menguatkan identifikasi basis pemilih sebagai "orang-orang hitam" (*black Turks*) yang terpinggirkan melawan kelas elite sekuler "orang-orang putih" (*white Turks*) (Meydan, 2023).

Prof. Yon menegaskan kemenangan Erdoğan berakar pada konstruksi narasi populis yang membangun citra kepemimpinan personal langsung kepada "rakyat" tanpa perantara elite politik tradisional (Y. Machmudi, Komunikasi Pribadi, Mei 14, 2025). Endro mengidentifikasi dua alasan kunci: kekhawatiran masyarakat konservatif-religius bahwa agenda akomodatif nilai agama terancam jika pemimpin lain terpilih, dan skeptisisme terhadap oposisi yang dianggap belum teruji dan kurang kredibel (E. Sampurna, Komunikasi Pribadi, Mei 20, 2025).

Dalam kerangka teori Moffitt (2016), keberhasilan Erdoğan dipahami melalui performativitasnya sebagai perwujudan "kehendak rakyat" autentik yang membangun antagonisme tegas antara "rakyat" dan "elite." Gaya personalistik ini memanfaatkan narasi krisis dan ketidakpercayaan terhadap institusi demokrasi tradisional.

Secara keseluruhan, kemenangan Erdoğan dalam Pemilu Presiden 2023 mencerminkan interaksi kompleks antara kerentanan sosial-ekonomi pasca-krisis, narasi populis yang mengkonstruksi musuh bersama, dan rezim otoriter kompetitif yang membatasi ruang politik oposisi. Kasus ini menunjukkan kemampuan rezim otoriter populis beradaptasi dengan tantangan dan memanfaatkan krisis untuk memperkuat hegemoni politik melalui narasi anti-Barat dan "Turkiye Baru."

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pergeseran strategi populisme yang diterapkan oleh Recep Tayyip Erdoğan, yang melibatkan narasi anti-Barat dan dewesternisasi, memainkan peran penting dalam keberhasilan politiknya, khususnya dalam Pemilu Presiden Turkiye 2023. Pergeseran ini menggambarkan

bahwa strategi populisme dapat berkembang dan beradaptasi seiring dengan perubahan konteks sosial-politik domestik dan internasional. Sebelumnya, Erdoğan dikenal dengan penggunaan populisme yang lebih inklusif, yang menargetkan elite sekuler domestik. Namun, sejak peristiwa-peristiwa besar seperti kudeta militer yang gagal pada 2016 dan krisis ekonomi pada 2018, dapat terlihat adanya transformasi dalam narasi yang digunakan oleh Erdoğan, di mana musuh utama yang dihadapi tidak hanya elite domestik tetapi juga Barat. Pergeseran ini sejalan dengan tren dewesternisasi yang lebih luas, yang tidak hanya berfokus pada pembentukan identitas nasional, tetapi juga memperkenalkan pendekatan baru dalam hubungan internasional Turkiye, dengan menantang pengaruh politik dan budaya Barat.

Secara teoretis, temuan dalam penelitian ini memperkaya kajian tentang populisme kontemporer, khususnya dalam hal bagaimana retorika populis dapat digunakan sebagai alat untuk mengonsolidasikan kekuasaan. Salah satu kontribusi utama dari penelitian ini adalah pemahaman mengenai bagaimana elemen-elemen dalam strategi politik populis, seperti penciptaan "musuh bersama" dan penggunaan narasi krisis, dapat digunakan untuk menggerakkan dukungan publik dan mengalihkan perhatian dari masalah domestik yang mengancam kestabilan politik seperti krisis ekonomi. Dalam konteks ini, populisme tidak hanya alat untuk memperkuat kedudukan politik, tetapi juga berfungsi untuk memobilisasi masyarakat, membentuk identitas kolektif, dan meredam oposisi, baik itu di tingkat domestik maupun internasional.

Selain itu, penelitian ini juga memberikan sumbangan penting dalam memahami bagaimana narasi politik dapat dibentuk oleh kekuatan geopolitik dan identitas nasional yang berkembang. Melalui pendekatan anti-Barat dan narasi dewesternisasi, Erdoğan berhasil menciptakan sebuah citra nasionalis yang kuat, yang tidak hanya mengonsolidasikan dukungan dari kelompok konservatif domestik, tetapi juga memperkuat posisi Turkiye sebagai negara yang independen dan mampu menantang hegemoni Barat dalam sistem internasional. Penggunaan narasi ini menunjukkan bagaimana populisme dapat berfungsi sebagai alat untuk memperkuat identitas nasional dalam menghadapi tekanan global.

Pada penelitian selanjutnya, penulis merekomendasikan untuk menitikberatkan kajian-kajian mengenai penggunaan media dalam strategi populisme secara lebih spesifik agar dapat memperlihatkan perspektif lain dari salah satu instrumen penting dalam populisme. Media sendiri memiliki peran penting dalam mengkonstruksi citra politik dan membentuk persepsi publik terhadap isu-isu tertentu. Dalam konteks Turkiye, media pro-pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai saluran komunikasi untuk mendistribusikan informasi, tetapi juga sebagai alat utama dalam memanipulasi narasi, memperkuat citra kepemimpinan Erdoğan, serta menggambarkan musuh-musuh politik baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Hal inilah yang juga menjadi batasan dalam penelitian penulis bahwa pembahasan mengenai penggunaan media oleh Erdoğan tidak dijelaskan secara komprehensif dan spesifik, khususnya dalam konteks Pemilu Presiden Turkiye 2023.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbiyik, A., & O'Donohue, A. (2023). Why do populist incumbents survive economic crises? How economic appeals won voters in Turkey's 2023 election. *Harvard Kennedy School*.
- Aksit, B. (2023). Erdoğan secures third term as Turkey's president. *BBC News*. <https://www.bbc.com/news/world-europe-65503015>.
- Audrey, H. (2023). Crisis in Turkey: An Analysis of Socio-Political Challenges and Economic Implications. *ENDLESS: International Journal of Futures Studies*, 6(2), 429–438 .
- Aydin-Duzgit, S., Kutlay, M., & Keyman, E. F. (2023). How Erdoğan Rules Through Crisis. *Journal of Democracy*, 34.
- Bilgin, A., & Öztürk, A. (2023). Democracy and opposition in Turkey: An introduction to the special issue. *Zeitschrift für Vergleichende Politikwissenschaft*, 17(3), 323–327. <https://doi.org/10.1007/s12286-023-00590-8>.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). *Using thematic analysis in psychology*. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.
- Cagaptay, S. (2002). The November 2002 elections and Turkey's new political era. *Middle East Review of International Affairs*, 6(4), 42–48.
- Canveren, O., & Kaiser, A. (2024). Exploring populism in Erdoğan's discourse on Turkey-European Union relations. *Czech Journal of International Relations*, 59(3).
- Castaldo, A. (2018) Populism and competitive authoritarianism in Turkey. *Southeast European and Black Sea Studies*, <https://doi.org/10.1080/14683857.2018.1550948>.

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- DeHanas, D. N., & Shterin, M. (2018). Religion and the rise of populism. *Religion, State and Society*, 46(3), 177–185. <https://doi.org/10.1080/09637494.2018.1502911>.
- Fide, E. B. (2020). The Authoritarian Shift of the Populist Discourse in Turkey. *Sobre jornalismo*, 9(1) 180–193.
- Hoffman, M., Werz, M., & Halpin, J. (2018). Turkey's 'New Nationalism' Amid Shifting Politics: Further Analysis of Polling Results. *Center for American Progress*.
- Kaliber, A., & Kaliber, E. (2019) From De-Europeanisation to Anti-Western Populism: Turkish Foreign Policy in Flux. *The International spectator*, 56(4), 1–16. <https://doi.org/10.1080/03932729.2019.1668640> .
- Kirby, P., & Goksedef, E. (2023) Turkish election victory for Erdoğan leaves nation divided. *BBC News*. <https://www.bbc.com/news/world-europe-65743031>.
- Korkut, U., Basbugoglu, T., & Sahin, O. (2023). Turkey's 2023 elections: Another victory for Erdoğan. *Political Insight*.
- Kutlay, M. & Öniş, Z. (2024). Governance crises and resilience of authoritarian populism: 2023 Turkish elections from the perspective of Hirschman's 'exit, voice, and loyalty'. *Southeast European and Black Sea Studies*, 24(2), 383–403. <https://doi.org/10.1080/14683857.2024.2315652>.
- Levitsky, S., & Way, L. A. (2010). *Competitive authoritarianism: Hybrid regimes after the Cold War*. Cambridge University Press.
- Loffmann, G. (2022). Introduction to special issue: The study of populism in international relations. *The British Journal of Politics and International Relations*, 24(3), 403–415. <https://doi.org/10.1177/13691481221103116>.
- Meydan, V. (2024). Right-wing populism vs. left-wing populism: Clash of alliances in the Turkish political system. *Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute*, 60, 385–399. <https://doi.org/10.30794/pausbed.1335757>.
- Moffitt, B. (2016). *The global rise of populism: Performance, political style, and representation*. Stanford University Press.
- Öniş, Z. (2023). Turkey's New Presidential Regime: Fragility, Resilience, Reversibility. *Reflektif Journal of Social Sciences*, 4(1), 159–179.
- Öniş, Z. & Kutlay, M. (2020). The Anatomy of Turkey's New Heterodox Crisis: The Interplay of Domestic Politics and Global Dynamics. *Turkish Studies*, 22(4), 499–529. <https://doi.org/10.1080/14683849.2020.1833723>.
- Ormeçi, O. (2023). 2023 Turkish elections: What is at stake, and what are the possible scenarios following the elections? *ADAPT Institute*.
- Oztaskin, M. (2023, May 23). How Erdogan won Turkey's earthquake-shattered south. *The Washington Post*. https://www.washingtonpost.com/world/2023/05/23/turkey-election-earthquakes-erdogan-kilicdaroglu/?utm_source
- Poli, M. D. (2016). Contemporary populism and the economic crisis in Western Europe. *Baltic Journal of Political Science*, 5(1), 41–50. <https://doi.org/10.15388/BJPS.2016.5.10335>.

- Puskapol UI. (2014). *Panduan praktis metode penelitian sosial*. Pusat Kajian Politik, Departemen Ilmu Politik FISIP UI.
- Qaseem, N. M., Nor H. M., & Azhana, M. (2016). Lessons learned from the electoral experience of the Justice and Development Party (Adalet ve Kalkınma Partisi) 2002-2011. *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities*, 6(2), 43–52.
- Sen, M. (2010). Transformation of Turkish Islamism and the rise of the Justice and Development Party. *Turkish Studies*, 11(1), 59–84. <https://doi.org/10.1080/14683841003747047>.
- Spáč, P., Matejova, M., Jusko, J., & Voda, P. (2024). Shaky ground, shaky politics? Effects of Türkiye's 2023 earthquakes on Erdoğan's political survival. *Environmental Hazards*.
- Taş, H. (2022). Continuity through change: Populism and foreign policy in Turkey. *Third World Quarterly*, 43(12), 2869–2887. <https://doi.org/10.1080/01436597.2022.2108392>.
- Taş, H. (2022). The formulation and implementation of populist foreign policy: Turkey in the Eastern Mediterranean. *Mediterranean Politics*, 27(5), 563–587. <https://doi.org/10.1080/13629395.2020.1833160>.
- Turk, H. B. (2018). Populism as a medium of mass mobilization: The case of Recep Tayyip Erdoğan. *International Area Studies Review*, 21(2), 150–168. <https://doi.org/10.1177/2233865918761111>.
- Tuysuz, G., Gezer, Y., & Qiblawi, T. (2023). Erdoğan wins Turkish election, extending rule to third decade. *CNN*. <https://edition.cnn.com/2023/05/28/europe/turkey-president-runoff-polls-Erdogan-intl/index.html>.
- Yardimci-Geyikci, S., & Yavuzyilmaz, H. (2024). The 2023 Turkish election: A tale of two campaigns and the duel of populisms. *Southeast European and Black Sea Studies*, 24(2), 259–275. <https://doi.org/10.1080/14683857.2024.2315650>.
- Yilmaz, I., & Morieson, N. (2023). Civilizational Populism in Domestic and Foreign Policy: The Case of Turkey. *Religions*, 14. <https://doi.org/10.3390/rel14050631>
- Yilmaz, I. (2021). The AKP's authoritarian, Islamist populism: Carving out a new Turkey. *European Center for Populism Studies*.
- Yilmaz, I., & Morieson, N. (2024). The Rise of Authoritarian Civilizational Populism in Turkey, India, Russia, and China. *Populism & Politics (P&P)*. European Center for Populism Studies (ECPS). <https://doi.org/10.55271/pp0033>.